

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

NO	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Nur Uthfi Khumairo dan Susanti	<i>Studi Komparasi Literasi Keuangan Berdasarkan Faktor Demografi Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya Angkatan 2013, Universitas Negeri Surabaya, Jurnal Pendidikan Akuntansi, Volume 04 Nomor 03 Tahun 2016</i>	Vriabel : jenis kelamin, tempat tinggal, kepemilikan rekening tabungan dan pengalaman bekerja responden, dan terdapat 4 indikator untuk mengukur literasi keuangan Mahasiswa pada penelitian ini yaitu pengetahuan umum tentang keuangan, tabungan dan pinjaman, investasi serta asuransi.	Data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan <i>independent samples t test</i> dengan bantuan program SPSS 21.0 <i>for windows</i> .	Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif membahas tentang faktor yang mempengaruhi literasi keuangan pada mahasiswa fakultas ekonomi UNESA. Hasil penelitian ini adalah terdapat perbedaan literasi keuangan antara mahasiswa laki-laki dan perempuan, terdapat perbedaan literasi keuangan antara mahasiswa yang tinggal sendiri dan tinggal bersama keluarga, terdapat perbedaan literasi keuangan antara mahasiswa yang mempunyai rekening tabungan dan tidak.	penelitian ini menganalisis literasi keuangan mahasiswa berdasarkan jenis kelamin, tempat tinggal, kepemilikan rekening tabungan dan pengalaman bekerja. Sedangkan penulis menambahkan pendidikan pra kuliah, program studi, pendapatan orang tua, IPK dan kepemilikan rekening tabungan syariah sebagai karakteristik responden. penelitian ini

						membahas literasi keuangan secara umum secara umum sedangkan penulis meneliti literasi keuangan syariah.
2.	Farah Margaretha dan Reza Arief Pambudhi	<i>Tingkat Literasi Keuangan Pada Mahasiswa S-1 Fakultas Ekonomi, Universitas Trisakti, 2015.</i>	Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sembilan variabel. Variabel tersebut adalah variabel dependen yakni variabel literasi keuangan Mahasiswa, dan variabel Independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Jenis kelamin, Usia, Tahun masuk mahasiswa (angkatan), IPK, Tempat tinggal Mahasiswa, Pendidikan orang tua dan Pendapatan orang. tua.	Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini di-analisis dengan menggunakan analisis statistik deskriptif dan analisis ragam satu arah (ANOVA).	Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif membahas tentang literasi keuangan mahasiswa S-1 FE Universitas Trisakti dan faktor yang mempengaruhinya. Hasil penelitian ini adalah terdapat pengaruh antara jenis kelamin, usia, IPK, dan pendapatan orang tua.	Penelitian ini membahas tentang tingkat literasi keuangan secara umum berdasarkan faktor demografi yang mempengaruhi, sedangkan penulis membahas literasi keuangan syariah mahasiswa dan peneliti tidak meneliti tentang pengaruh faktor demografi terhadap literasi keuangan mahasiswa.

3.	Anastasia Sri Medari dan Suramaya Suci Kewal	<i>Tingkat Literasi Di Kalangan Mahasiswa STIE MUSI. STIE MUSI 2013.</i>	Variabel dependennya adalah <i>financial literacy</i> dan variabel independennya adalah program studi, jenis kelamin, usia, status kekeluargaan, jenjang pendidikan, jenis pekerjaan, pengalaman kerja, pendapatan, toleransi terhadap risiko	Teknik analisa data yang digunakan adalah analisa deskriptif dan regresi logistik.	Penelitian ini adalah penelitian deskriptif membahas tentang literasi keuangan mahasiswa dikalangan mahasiswa STIE MUSI. Hasil dari penelitian ini adalah tingkat literasi keuangan mahasiswa STIE MUSI masih rendah.	Pada penelitian ini aspek yang diteliti untuk mengukur tingkat literasi mahasiswa yaitu pengetahuan secara umum tentang keuangan pribadi, simpan pinjam, asuransi dan investasi. Sedangkan penulis mengambil dari sudut pandang syariah dan menambahkan variabel Zakat Infaq dan Sedekah.
4.	Hery Syaerul Homan	<i>Comparative Study of Student Financial Literacy And Its Demographic Factors.</i>	Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Jenis Kelamin, Status Tempat Tinggal, Pendidikan Orangtua, Pendapatan Orangtua.	Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan Uji Mann-Whitney dan Uji Chi Square.	Penelitian ini membahas tentang literasi keuangan dikalangan mahasiswa STIE Bandung dan faktor demografi yang mempengaruhi. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat perbedaan literasi keuangan antara mahasiswa laki-laki dan perempuan, serta tidak ada perbedaan literasi keuangan mahasiswa yang tinggal sendiri dan tinggal bersama orang tua.	Penelitian tersebut membahas mengenai literasi keuangan mahasiswa secara umum sedangkan penulis akan meneliti tentang literasi keuangan syariah pada mahasiswa dan peneliti tidak meneliti factor demografi yang

						mempengaruhi literasi keuangan. Faktor demografi oleh peneliti hanya sebagai informasi identitas responden saja.
--	--	--	--	--	--	--

Sumber: Data sekunder (penelitian terdahulu)

Dari beberapa penelitian terdahulu yang telah diuraikan dalam tabel 2.1 diatas dapat tarik kesimpulan bahwa penelitian tersebut dilakukan untuk mengetahui tingkat literasi keuangan pada Mahasiswa secara umum, sedangkan dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian tentang tingkat literasi keuangan syariah yang mencakup pemahaman Mahasiswa terhadap ekonomi syariah, Keuangan Pribadi, Perbankan Syariah, Asuransi Syariah, Pasar Modal Syariah, Pembiayaan Syariah, Dana Pensiun Syariah, serta Zakat, Infak da Sedekah (ZIS). Penelitian ini akan dilakukan pada mahasiswa EPI dan EKPI angkatan 2014 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

B. Kerangka Teoritik

1. Pengertian Literasi keuangan

Literasi keuangan dapat diartikan sebagai kombinasi kesadaran, pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan untuk membuat keputusan keuangan yang sehat dan akhirnya mencapai kesejahteraan keuangan individu.¹ Literasi keuangan merupakan kemampuan seorang individu dalam memahami, mengimplementasikan serta memiliki kemampuan dalam mengelola keuangan dengan tujuan mencapai kesejahteraan ekonomi.² Selanjutnya literasi keuangan menurut Lusardi dan Mitchell (2007) adalah pengetahuan keuangan dan kemampuan rakyat dalam menerima informasi dan membuat keputusan perencanaan keuangannya.³

Dari definisi diatas tentang literasi keuangan maka dapat disimpulkan bahwa melek keuangan atau lebih dikenal dengan literasi keuangan adalah pemahaman seorang individu terhadap pengetahuan keuangan, serta bagaimana kemampuan seorang individu menganalisis dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari dan mampu

¹ OECD INFE (2011) Measuring Financial Literacy: Core Questionnaire in *Measuring Financial Literacy: Questionnaire and Guidance Notes for conducting an Internationally Comparable Survey of Financial literacy*. Paris: OECD, 2011, hal. 3.

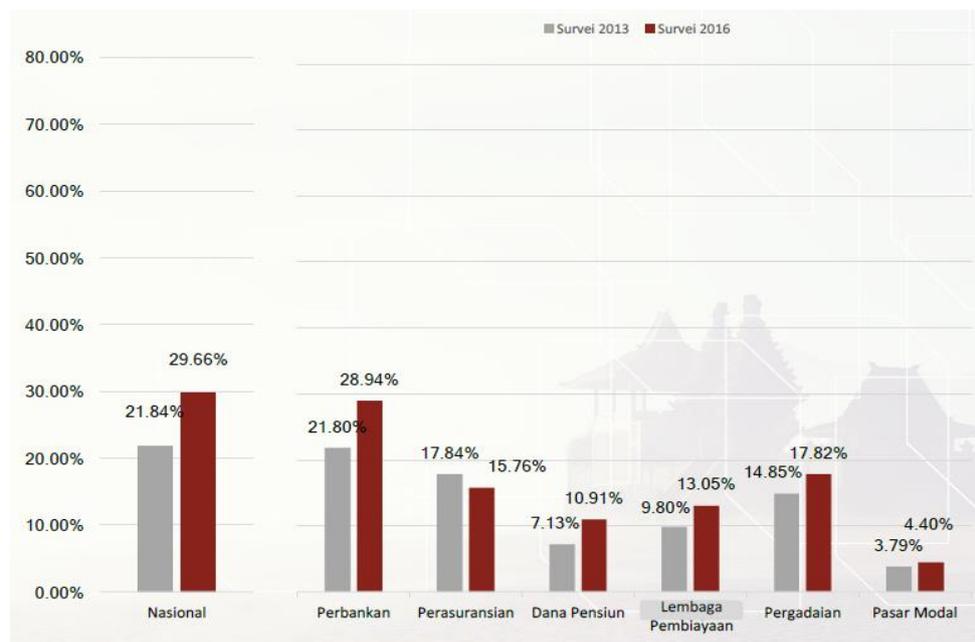
² Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.07/2014 Tentang Pelaksanaan Edukasi Dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan Kepada Konsumen Dan/Atau Masyarakat. (<http://www.ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungan-konsumen/regulasi/surat-edaran-ojk/Pages/SEOJK-tentang-Pelaksanaan-Edukasi-Dalam-Rangka-Meningkatkan-LK-Kepada-Konsumen.aspx.#sthash.yW4KIGFL.dpuf>), diakses pada tanggal 10 Februari, Pukul: 20.34 WIB.

³ Annamaria Lusardi dan Olivia S. Mitchel, *The Economic*.,hal. 2

mengambil keputusan keuangan serta sadar akan resiko yang akan dihadapi atas keputusan yang diambilnya.

Pada tahun 2013 OJK melakukan survei nasional literasi keuangan masyarakat yang dilakukan di 20 Provinsi dengan melibatkan 8.000 responden, kemudian di tahun 2016 OJK kembali melakukan survei kepada 9.680 responden di 34 Provinsi di Indonesia dengan hasil sebagai berikut:

Gambar 2.1 Hasil Survei Nasional Literasi Keuangan Indonesia 2013-2016



Sumber: <http://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Download/251>

Berdasarkan gambar di atas terlihat bahwa secara umum indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia dari tahun 2013-2016 mengalami peningkatan yaitu dari 21,84 persen menjadi 29,66 persen. sektor perbankan memiliki indeks literasi keuangan paling tinggi yaitu 21,80

persen pada tahun 2013 dan mengalami kenaikan pada tahun 2016 yaitu 28,94 persen.

2. Tujuan Literasi Keuangan

Tujuan literasi keuangan adalah sebagai berikut :

- a. Mampu meningkatkan literasi individu dari *Less Literate* (literasi rendah) atau *Not Literate* (tidak melek) menjadi *Well Literate* (literasi baik).
- b. Meningkatkan jumlah pengguna produk jasa keuangan.

Individu dengan tingkat literasi keuangan yang tinggi mampu menentukan produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan, memahami dengan benar manfaat dan risikonya, paham akan hak dan kewajiban serta meyakini atas apa yang menjadi keputusan dalam penggunaan produk dan jasa keuangan dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.⁴

3. Manfaat Literasi Keuangan

Literasi keuangan merupakan program nasional untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat memiliki berbagai manfaat sebagai berikut:⁵

- a. Bagi Industri Keuangan
 - 1) Semakin tinggi potensi transaksi keuangan yang dilakukan masyarakat maka potensi keuangan yang diperoleh lembaga jasa keuangan (LJK) semakin besar.

⁴ O JK (Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia).

⁵ *Ibid.*

2) Memotivasi LJK mengembangkan produk dan layanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

b. Bagi Masyarakat

1) Mampu memilih dan memanfaatkan produk jasa keuangan.

2) Memiliki kemampuan dalam melakukan perencanaan keuangan dengan lebih baik.

3) Terhindar dari aktivitas investasi pada instrument keuangan yang tidak tidak jelas.

4) Mendapatkan pemahaman mengenai manfaat dan risiko produk dan jasa keuangan.

c. Ekonomi Makro

1) Semakin banyak masyarakat yang *well literate* semakin banyak jumlah pengguna produk dan jasa keuangan sehingga pada akhirnya akan menciptakan pemerataan kesejahteraan.

2) Semakin banyak yang menabung dan berinvestasi diharapkan sumber dana untuk pembangunan semakin meningkat.

3) Semakin banyak orang yang memanfaatkan dana lembaga jasa keuangan, intermediasi disektor jasa keuangan diharapkan semakin besar.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan literasi keuangan di Indonesia dengan tujuan agar masyarakat yang sebelumnya *less literate* atau *not literate* menjadi *well literate* yaitu melalui penyusunan

Strategi Literasi Keuangan Nasional Indonesia yang terdiri dari 3 pilar:⁶

Gambar 2.2 Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia



Sumber: OJK (Strategi Literasi Keuangan Indonesia)

- a. Pilar 1: Edukasi dan Kampanye Nasional Literasi Keuangan
 - 1) Meningkatkan *awareness*, pengetahuan dan keterampilan masyarakat mengenai produk dan jasa keuangan.
 - 2) Mengubah pola pikir dan perilaku keuangan masyarakat.
 - 3) Meningkatkan jumlah pengguna jasa keuangan.
- b. Pilar 2: Penguatan Infrastruktur Literasi Keuangan
 - 1) Memperkuat dan mendukung edukasi dan kampanye nasional literasi keuangan.
 - 2) Memperluas dan mempermudah akses informasi literasi keuangan.
 - 3) Mendorong keberlangsungan program literasi keuangan.

⁶ OJK (Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia).

c. Plar 3: Pengeembangan Produk dan Jasa Keuangan

- 1) Mendorong Lembaga Jasa Keuangan untuk mengembangkan produk dan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- 2) Mendorong Lembaga Jasa Keuangan meningkatkan kualitas dan jasa keuangan.
- 3) Mendorong Lembaga Jasa Keuangan untuk memperluas jaringan area layanan jasa keuangan.

Literasi keuangan masyarakat berdasarkan Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia dibagi menjadi 4, yaitu :

Tabel 2.2 Klasifikasi Literasi Keuangan Masyarakat (OJK)

Kategori	Keterangan
<i>Well Literate</i>	Memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan, serta memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan.
<i>Sufficient Literate</i>	Memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan.
<i>Less Literate</i>	Hanya memiliki pengetahuan tentang lembaga jasa keuangan, produk dan jasa keuangan.
<i>Not Literate</i>	Tidak memiliki pengetahuan dan keyakinan terhadap lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, serta tidak memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan.

Sumber:<http://www.ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungan-konsumen/Pages/Literasi-Keuangan.aspx>

Sedangkan menurut Chen dan Volpe (1998) klasifikasi literasi keuangan seorang individu dikategorikan menjadi 3 yaitu :⁷

Tabel 2.3 Klasifikasi Kategori Literasi Keuangan (Chen dan Volpe) 1998

Kategori	Keterangan
<60 %	Literasi Keuangan Rendah
60 % - 79 %	Literasi Keuangan Sedang
>80 %	Literasi Keuangan Tinggi

Sumber: Haiyang Chen dan Ronald P. Volpe., *An Analysis*, hal.109

Pengkategorian tingkat literasi keuangan Individu menurut Chen dan Volpe (1998) didasarkan pada persentase jawaban benar dari masing-masing pertanyaan untuk mengukur literasi keuangan yang diberikan kepada responden.

4. Cakupan Literasi Keuangan

Pada umumnya lembaga keuangan bank lebih dikenal oleh masyarakat, padahal cakupan literasi keuangan tidak hanya sebatas pada lembaga bank saja tetapi mencakup beberapa lembaga lainnya seperti, asuransi, perusahaan pembiayaan, dana pensiun, pasar modal dan pegadaian.

a. Perbankan

Perbankan merupakan segala hal yang menyangkut bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya, sedangkan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam

⁷ Haiyang Chen dan Ronald P. Volpe., *An Analysis*, hal.109

bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.⁸

b. Asuransi

Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis dimana perusahaan asuransi memberikan pertanggungan risiko kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.⁹

c. Perusahaan Pembiayaan

Perusahaan pembiayaan adalah badan usaha diluar Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha “Lembaga Pembiayaan”.¹⁰ Fungsi pembiayaan adalah memberikan fasilitas kepada masyarakat untuk memperoleh suatu asset yang dapat memberikan nilai tambah melalui skema pinjaman.

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. (<http://www.hukumonline.com/pusatdata/downloadfile/lt4cce89fb14e43/parent/334>), diakses pada tanggal 10 Februari 2017, Pukul: 20.18 WIB

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. (<http://www.hukumonline.com/pusatdata/downloadfile/lt54606b814dc1a/parent/lt54606a95b1521>), diakses pada tanggal 10 Februari 2017, Pukul: 20.20 WIB

¹⁰ OJK (Startegi Nasional Literasi Keuangan Indonesia).

d. Dana Pensiun

Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun.¹¹ Tujuan dana pensiun adalah mempersiapkan masa tua (pensiun) seorang individu dapat menjalani masa pensiun dengan mandiri dan layak.

e. Pasar Modal

Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.¹²

f. Pergadaian

Perusahaan pergadaian adalah perusahaan pergadaian swasta dan perusahaan pergadaian pemerintah yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa yang melakukan kegiatan menyangkut pemberian pinjaman dengan jaminan barang bergerak, jasa titipan, jasa taksiran, dan/atau jasa lainnya termasuk yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah.¹³

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun. (<https://www.komisiinformasi.go.id/regulasi/download/id/122>), diakses pada tanggal 10 Februari 2017, Pukul: 20.22 WIB.

¹² Undang-Undang Republik Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. (http://www.sampoerna.com/id_id/investor_information/capital_market_regulation/documents/uu%20no%208%20tahun%201995%20tentang%20pasar%20modal.pdf.) diakses pada tanggal 10 Februari 2017, Pukul: 20.25 WIB.

¹³ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 Tentang Usaha Pergadaian. (<http://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/peraturan-ojk/Documents/Pages/POJK-usaha-pergadaian-/POJK-Usaha-Pergadaian.pdf>), diakses pada tanggal 10 Februari 2017, Pukul: 20.28 WIB.

5. Ekonomi Islam Sebagai Konsep Dasar Literasi Keuangan Syariah

a. Ekonomi Islam

*Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai falah berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah.*¹⁴

Agama Islam memberikan tuntunan terhadap seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk melakukan kegiatan ekonomi (*Muamalah*). Tujuan Ekonomi Islam adalah untuk memperoleh kebahagiaan dan kemuliaan dari Allah SWT.¹⁵

1) Nilai-nilai Dasar Ekonomi Islam:¹⁶

a) *Adl*

Adl (adil) merupakan nilai dasar dalam ajaran Islam. Keadilan dalam Islam merupakan suatu keadaan dimana terdapat kesamaan perlakuan dimata hukum, kesamaan hak kompensasi, hak hidup secara layak, hak menikmati pembangunan dan tidak adanya pihak yang dirugikan serta adanya keseimbangan dalam aspek kehidupan.

b) *Khilafah*

Khilafah memiliki makna yaitu tanggung jawab sebagai utusan Allah SWT didunia. Cakupan *Khilaffah* lebih jelas dalam beberapa aspek berikut ini:

¹⁴ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Atas Kerja Sama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2013, hal. 19.

¹⁵ *Ibid.*, hal. 16

¹⁶ *Ibid.*, hal. 59-63

- (1) Tanggung jawa berperilaku ekonomi dengan cara yang benar

Berperilaku ekonomi yang benar dalam Islam berarti bahwa manusia dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya ekonomi tidak bertentangan dengan ajaran Islam yang dapat berdampak pada kerusakan lingkungan dan kerugian.

- (2) Tanggung jawab untuk mewujudkan *maslahah* maksimum

Dalam Ekonomi Islam hal yang sangat ditekankan dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ekonomi adalah memberikan manfaat sebesar-besarnya terhadap kehidupan manusia guna mencapai kesejahteraan hidup.

- (3) Tanggung jawab perbaikan kesejahteraan setiap individu

Porsi rizki masing-masing orang akan berbeda hal tersebut sudah menjadi kehendak Allah SWT, karena Allah mengetahui porsi rizki yang tepat bagi masing-masing individu. Islam melarang adanya monopoli kesejahteraan, setiap individu yang memiliki kelebihan rizki memiliki kewajiban (bertanggung

pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.

Riba bermakna *ziyadah* (tambahan), riba berarti pengambilan tambahan dari pokok pinjaman yang dibebankan kepada peminjam secara batil.¹⁸ Kegiatan riba dapat menimbulkan ketidakadilan maka riba harus dihilangkan dalam kegiatan ekonomi Islam karena prinsip keadilan merupakan nilai dasar ekonomi Islam.

b) Pelembagaan Zakat

Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh wajib zakat (*muzzaki*) kepada yang berhak menerima zakat (*Mustahik*).¹⁹ Perintah menunaikan zakat tercantum dalam QS. Al-Baqarh:110 sebagai berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

110. dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Alah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.

Zakat merupakan instrumen untuk menjaga keseimbangan dan keadilan kesejahteraan sosial antara *Muzzaki* dan *Mustahik*, sehingga tidak terjadi kesenjangan sosial pada

¹⁸ Antonio, Muhammad Syafi’I, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2014, hal. 37.

¹⁹ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Atas Kerja Sama Dengan Bank Indonesia, *Ekonomi*, hal. 71

masyarakat oleh karena itu zakat merupakan cermin komitmen sosial dari ekonomi Islam. Dengan adanya pelembagaan dana zakat, pengelolaan dan pendistribusian dana zakat akan berjalan dengan baik. Zakat dikelola oleh lembaga resmi dari pemerintahan dan menjadi bagian utuh keuangan Negara, oleh karenanya zakat memberikan gambaran kondisi nyata masyarakat dalam sebuah Negara.

c) Pelarangan *Gharar*

Unsur *Gharar* dilarang dalam aktivitas ekonomi Islam. *Gharar* memiliki makna samar-samar atau ketidakpastian. Unsur *gharar* dilarang dalam Islam karena suatu kegiatan ekonomi dalam Islam haruslah secara gamblang dan pasti, tidak terdapat unsur untung-untungan (spekulasi) atau perjudian. Pelarangan *gharar* dalam Islam adalah untuk menghindari kerapuhan dan ketidakstabilan perekonomian baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. *Gharar* dalam hal jual beli bermakna memakan harta sesame dengan cara yang batil. Larang *gharar* tercantum dalam QS. An-Nissa:29 sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا
اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

29. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu: Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

d) Pelarangan yang Haram

Kegiatan ekonomi yang dibolehkan dalam Islam adalah yang *halalan toyyiban* yaitu benar menurut hukum Islam dan baik dalam pandangan Islam. Meninggalkan yang haram (*zat* maupun prosesnya) merupakan kewajiban bagi setiap Muslim. Islam mengharamkan dalam hal *zat* seperti mengkonsumsi, memproduksi, mendistribusikan alkohol (*khamr*) dan sejenisnya yang dapat menghilangkan akal sehat, daging babi, binatang buas, bangkai kecuali ikan, hewan yang disembelih dengan tidak menyebut asma Alloh SWT. Kemudian haram dalam hal prosesnya yaitu, transaksi yang mengandung unsur *gharar* (spekulasi) yang berpotensi ketidakadilan, perjudian, pencurian, perampokan, riba, tidak terang-terangan (menutupi informasi yang relevan kepada pihak lain), prostitusi dan lain sebagainya. Perintah tentang memakan rizki yang *halal* tercantum dalam QS. Al-Maidah:88 sebagai berikut:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ

بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

88. dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.

Larangan meminum *khamr*, melakukan perjudian, tercantum dalam QS. Al-Maidah:90 sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ
رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

90. Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

Ekonomi Islam berdasarkan penjelasan dalam Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, bahwa perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip Islam meliputi:²⁰

- (1) Bank Syariah
- (2) Lembaga Keuangan Mikro Syariah
- (3) Asuransi Syariah
- (4) Reasuransi Syariah
- (5) Reksa Dana Syariah
- (6) Obligasi Syariah

²⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (<http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2006/3TAHUN2006UU.htm>.) diakses pada tanggal 20 Februari 2017, pukul: 24.57 WIB.

- (7) Sekuritas Syariah
- (8) Pembiayaan Syariah
- (9) Pegadaian Syariah
- (10) Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah
- (11) Bisnis Syariah

b. Literasi Keuangan Syariah

Literasi keuangan atau melek keuangan dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk memahami pengetahuan serta keterampilan untuk mengelola sumber daya keuangan untuk mencapai kesejahteraan.²¹ Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan adanya literasi keuangan masyarakat tidak hanya mengetahui produk dan jasa lembaga keuangan tetapi masyarakat juga mampu menggunakan serta memperbaiki pengelolaan keuangan guna mencapai kesejahteraan ekonomi.

Dalam konteks literasi keuangan syariah dapat diartikan bahwa melek keuangan syariah berarti konsumen produk dan jasa keuangan syariah atau masyarakat luas diharapkan tidak hanya sebatas mengetahui produk dan jasa lembaga keuangan syariah melainkan masyarakat mampu memahami serta menggunakan produk dan jasa lembaga keuangan syariah sebagai langkah merubah perilaku

²¹ Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.07/ 2014 Tentang Pelaksanaan Edukasi Dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan Kepada Konsumen Dan/Atau Masyarakat. (<http://www.ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungan-konsumen/regulasi/surat-edaran-ojk/Pages/SEOJK-tentang-Pelaksanaan-Edukasi-Dalam-Rangka-Meningkatkan-LK-Kepada-Konsumen.aspx#sthash.3waR517q.dpuf>), diakses pada tanggal 10 Februari 2017, Pukul: 20.37 WIB.

masyarakat dalam pengelolaan keuangan untuk mencapai kesejahteraan ekonomi. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan literasi keuangan syariah yaitu meningkatkan literasi seseorang yang sebelumnya *less literate* dalam keuangan syariah menjadi *well literate* dalam keuangan syariah.

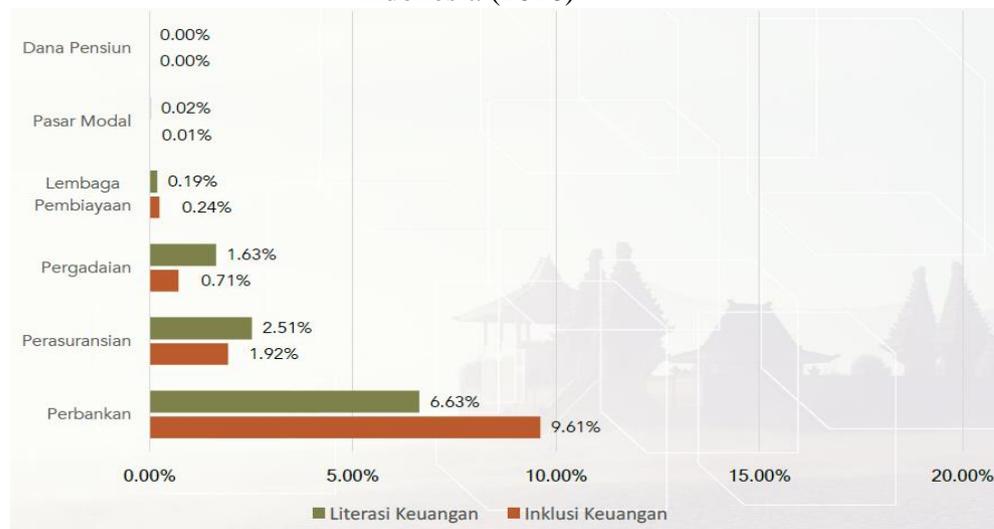
Literasi keuangan syariah juga dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk menggunakan pengetahuan keuangan, keterampilan dan sikap dalam mengelola sumber daya keuangan sesuai dengan ajaran Islam.²²

Hasil survei literasi keuangan syariah yang dilakukan pada tahun 2016 menunjukkan hasil bahwa literasi keuangan syariah masyarakat Indonesia sebesar 8,11 persen sedangkan inklusi keuangan syariah sebesar 11,06 persen, hal ini menunjukkan bahwa penggunaan produk dan jasa keuangan syariah lebih tinggi jika dibandingkan dengan pemahamannya.²³ Indeks literasi keuangan syariah masyarakat Indonesia pada beberapa sektor dapat dilihat pada gambar 2.3 sebagai berikut:

²² Rahim, Siti Hafizah Abd, Rashid Rosemaliza Ad, dan Hamed, Abu Bakar, *Factor Analysis of Islamic Financial Literacy and Its Determinan: A Pilot Study, International Soft Science Conference (ISSC), 2016.*

²³ <http://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Download/251> , diakses pada tanggal 26 Februari, pukul: 23.54 WIB.

Gambar 2.3 Indeks Literasi Keuangan Syariah Masyarakat Persektor Indonesia (2016)



Sumber: <http://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Download/251>

Berdasarkan gambar 2.3 terlihat bahwa indeks literasi keuangan syariah pada sektor perbankan syariah paling dikenal oleh masyarakat, memiliki nilai yang paling tinggi yaitu 6,63 persen dengan indeks inklusi sebesar 9,61 persen sedangkan sector pasar modal memiliki indeks literasi keuangan syariah yang paling rendah yaitu 0,02 persen.

Konsep literasi keuangan syariah tidak lepas dari konsep dasar ekonomi Islam yaitu larangan *riba* (bunga), larangan *gharar* (ketidakpastian), dan larangan *maysir* (perjudian).²⁴ Ekonomi Islam hadir sebagai alternatif bagi kaum muslim dalam pemenuhan kebutuhan keuangannya. Dengan lebih dari 220 juta jiwa di Indonesia

²⁴ Antara, Purnomo M., Musa, Rosidah, dan Hassan, Faridah, *Bridging Islamic Financial Literacy and Halal Literacy : The Way Forward in Hala Ecosystem*, Fifth International Conference On Marketing And Retailing (5th INCOMar) 2015, Procedia Economics and Finance 37, 2016, hal. 199.

beragama Islam menjadikan Indonesia sebagai Negara Islam terbesar di dunia dan memiliki potensi yang besar di bidang keuangan Islam.²⁵

Dalam penelitian Rahim dkk (2016) ditemukan bahwa faktor keputusan, religiussitas dan kepuasan keuangan berpengaruh terhadap literasi keuangan Islam pada mahasiswa Universitas Utara Malaysia.²⁶ Abdulah dan Anderson dalam penelitiannya ditemukan 9 faktor yang mempengaruhi literasi keuangan Islam pada banker di Kuala Lumpur yaitu, produk perbankan, produk perbankan syariah, pengaruh orang tua, Investasi, kemudahan produk konvensional, pengelolaan keuangan pribadi, manajemen keuangan pribadi, manajemen dan perencanaan kekayaan, sikap terhadap jasa keuangan islam.²⁷ Abdillah dan Razak dalam penelitiannya membahas berbagai komponen dalam konsep literasi keuangan Islam guna mengetahui melek financial Islam di Brunei, yaitu penghasilan yang halal, konsumsi, tabungan, zakat, takaful, dana pensiun, ivestasi, waris, wasiyah dan wakaf.²⁸ Konsep literasi keuangan Islam yang akan diusung pada penelitian ini adalah pemahaman tentang ekonomi Islam, pengetahuan keuangan pribadi (perilaku konsumsi dan penghasilan

²⁵ Lackman, Bedi Grunter, *The Six Key Countries Driving Global Islamic Finance Growth*, Research Assosite, Nomura Institute Of Capital Markets Research, hal.8

²⁶ Rahim, Siti Hafizah Abd, Rashid Rosemaliza Ad, dan Hamed, Abu Bakar., *Factor*, hal. 414.

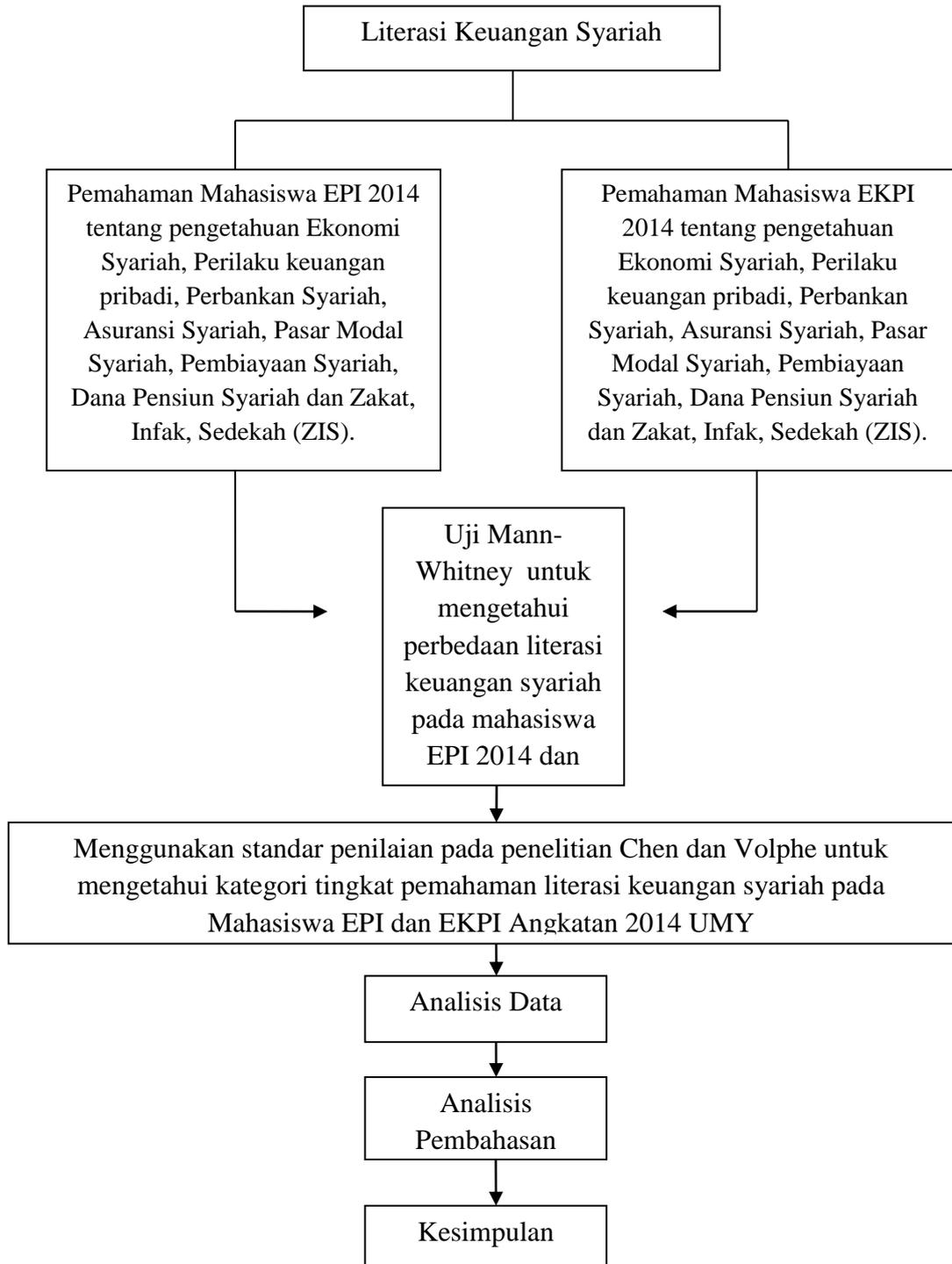
²⁷ Abdullah, Mohammad Azmi dan Anderson Alex, *Islamic Financial Literacy among Bankers in Kuala Lumpur*, Journal of Emerging Economies and Islamic Research, vol.3, No.2, 2015, hal. 8.

²⁸ Abdulliah, Rose dan Razak, Ahmad Luthfi Haji, *Explanatory Research Into Islamic Literacy In Brunei Darussalam*, Faculty of Bussines and Management Sciences Universitas Islam Sultan Sharif Ali, Brunei Darussalam.

yang *halal*), tabungan syariah, asuransi syariah, pembiayaan syariah, dana pensiun, pasar modal syariah dan kewajiban berzakat.

C. Kerangka Berfikir

Gambar 2.4 Kerangka Berfikir



Dari kerangka berfikir diatas dapat dijelaskan bahwa melalui penelitian ini akan dilakukan pengamatan terhadap literasi keuangan syariah pada mahasiswa EPI 2014 dan mahasiswa EKPI 2014 kemudian dari data hasil pengamatan keduanya dibandingkan dan dilakukan pengkategorian tingkat pemahaman literasi keuangan syariah pada Mahasiswa EPI dan EKPI angkatan 2014 untuk kemudian ditarik sebuah kesimpulan.

D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah dugaan sementara atas rumusan masalah dalam sebuah penelitian.²⁹ Hasil penelitian tentang “*Analisis Tingkat Literasi Keuangan Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta Tahun Angkatan 2012-2014*” yang dilakukan oleh Ulfatun, Udhma dan Dewi menunjukkan hasil bahwa tingkat literasi keuangan Mahasiswa pada Fakultas Ekonomi UNY angkatan 2012-2014 berbeda dimana Program Studi Pendidikan Ekonomi memiliki nilai tertinggi yaitu 60 persen, dan nilai terendah dimiliki oleh Mahasiswa Program Studi Administrasi Perkantoran yaitu sebesar 51 persen.³⁰ Berdasarkan uraian hasil penelitian diatas dapat dirumuskan hipotesis yang akan diuji pada penelitian ini adalah :

H_0 : Tidak terdapat perbedaan literasi keuangan syariah antara mahasiswa Ekonomi dan Perbankan Islam (EPI) dan mahasiswa Ekonomi Keuangan dan Perbankan Islam (EKPI).

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2013, hal. 99

³⁰ Ulfatun, Titik, Udhma, UmiSyafa'atul dan Dewi, Rina Sari, *Analisis Tingkat Literasi Keuangan Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta Tahun Angkatan 2012-2014*. Universitas Negeri Yogyakarta. PELITA, Volume XI, Nomor 2, Agustus 2016, hal. 12.

H_a : Terdapat perbedaan literasi keuangan syariah antara mahasiswa Ekonomi dan Perbankan Islam (EPI) dan mahasiswa Ekonomi Keuangan dan Perbankan Islam (EKPI).